

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). *Analisis Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Adnjani, M. D. dan M. (2018). Strategi Sosialisasi Migrasi Sistem Penyiaran Analog Ke Digital Di Jawa Tengah. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 755–766.
- Ahmad Abdurrahman Wahid, A. pakai teori edward 3 dan pakai mandeley S. G., Kadhung Prayoga. (2021). Problematika Implementasi Program Kartu Tani Di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 5(3), 1–12.
- Ahmad, K. S., Shohibul Mufid, dan Mufarrihul Hazin. (2017). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Ngadiluwih. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1).
- Ardianto, E., Lukiaty K, Siti K. (2015). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi (IV)*. Simbiosis Rekatama Media.
- Ashrianto, P. D. (2015). Studi Kesiapan Lembaga Penyiaran Terhadap Penerapan Sistem Penyiaran Berteknologi Digital di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 158–172.
- Assyari, A. (2020). Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8(1), 76–96.
- Breindl, Yana. (2013). Discourse *networks* on state-mandated access blocking in Germany and France. 15(6), 42 – 62

- Badjuri, A. K. dan Y. (2016). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang.
- Budi, A., Azhar Kasim. (2021). Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2). <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5603>
- Budiman, A. (2020). PROSPEK RADIO TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA MULTIPLEKSING. *Syntax Idea*, 5(4), 1565–1587.
- Barrett, M. (1991) 'Ideology, politics, hegemony: from Gramsci to Laclau and Mouffe', in M. Barrett: *The Politics of Truth. From Marx to Foucault*. Cambridge: Polity Press
- Curran, J. (2002). *Media and Power*. Routledge, London-Newyork. in the Korean and global Media.
- Creswell, John W. (2017). *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Creswell, John, W. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Inc City: Sage Publications
- Dunn, W. N. (2018). *Public Analog Swicth Off Analysis An Integrated Approach*. Routledge.
- Eadie, W. F. (2015). *Century Communication: A reference handbook* (III). Sage Publications Pvt. Limited.

- Edward III, G. C. (2016). *Implementing Public Analog Swicth Off* (Edisi kelima). Congressional Quarterly Press.
- Ervan, I., Siti Dewi Sri Ratna Sari, Yuni Tresnawati. (2019). *REGULASI PENYIARAN DIGITAL: DINAMIKA PERAN NEGARA, PERAN SWASTA, DAN MANFAAT BAGI RAKYAT*. 17(2).
- Fairclough, Norman. 1997. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Fisher, Dana R., Leifeld, Philip & Iwaki, Yoko. (2013). Mapping The Ideological Network of American Climate Politics. *Climatic Change*. 116 (3-4), 523-545
- Fidler, R. (2016). *Mediamorfosis: Memahami Media Baru*. Terjemahan Hartono Hadikusumo (V). Bentang Budaya.
- Gazali, E. (2015). *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas* (5 ed.). Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Islamy, I. (2017). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2009). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, speech recognition, and computational linguistics* (2nd ed.). Prentice-Hall
- Kingdon, J.W. (2003). *Agendas, Alternatives and Public Policies*. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc

Kleinschmit, D. (2012). Confronting the demands of a deliberative public sphere with media constraints. *Forest Policy and Economics*. 16, 71–80.

Kominfo. (2021). *Siaran TV Analog Wajib Berhenti 2 November 2022*”, 3 Desember 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201203073928-213-577369/kominfo-siaran-tv-analog-wajib-berhenti-2-november-2022>, diakses 4 Mei 2021.

<https://www.741.kompasiana.com/regulasi-penyiaran-di-indonesia>;

Leifeld, P. and Haunss, S. (2012). Political discourse *networks* and the conflict over software patents in Europe, *European Journal of Political Research*. 51(3), 382-409

Leifeld Philip, 2019, "Reconceptualizing *Major Analog Switchoff* change in the Advocacy Coalition Framework: A Discourse Network Analysis of German Pension Politics" *The Policy Studies Journal* 41(1): 169–198.

Leifeld Philip, 2020. "Politics and Governance *Policy Debates and Discourse Network Analysis*", University of Essex, Rua Fialho de Almeida 14, 2º Esq., 1070-129 Lisbon, Cogitatio, Portugal.

Laclau, E. and Mouffe, C. (1985) *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.

Laclau, E. (1990) *New Reflections on the Revolution of Our Time*. London: Verso.

- Laclau, E. (1993b) 'Power and representation', in M. Poster (ed.), *Politics, Theory and Contemporary Culture*. New York: Columbia University Press.
- Marianne Jorgensen and Louise J. Phillips. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. SAGE Publications Inc 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320
- Mairita, D., Tazri, M. T. M. ,. & Sumayah, S. (2021). Pola Kebijakan KPID Wilayah Riau dalam Mengawasi Digitalisasi Penyiaran. *Syntax Idea*, 3(7), 65–75.
- Mediansyah, A. R. (2017). Jaringan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Transportasi di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 5(2), 14–22.
- Nugroho, D., Riant. (2016). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Nur, M. M. (2019). Menggali Kebijakan Penyiaran Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 60–72.
- Onong, U. E. (2018). *Ilmu Komunikasi (Keempat)*. PT Remaja. Rosdakarya.
- Paraden, L. S. (2013). Analisis Hambatan Komunikasi Organisasi Vertikal Pt Pos Indonesia \*(te+rsero) (Kasus Pada Kantor Pos Medan). *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 3(2), 133–164.
- Park, M.S. (2009). Media Discourses in Forest Communication: The Issue of Forest Conservation

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 Tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)
- Puji, R. B. W. I. A. Y. S. Z. Moch. F. C. R. M. A. E. S. (2012). *Digitalisasi Televisi di Indonesia Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan*. PR2Media-Yayasan Tifa.
- Ratna, C., Ade Nurul Aida Tio Riyono, Riza Aditya Syafri. (2021). Menuju Digitalisasi Siaran TV di Indonesia. *Politik dan Keamanan Budget Issue Brief*, 1(11). [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
- Rulinawati, M. (2016). *Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Industri Pengolahan Di Indonesia (Periode 2005-2016)* [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin.
- Sihite, B. (2021). *Implementasi Program Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi* [Skripsi, Universitas Sumatera Utara]. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/37684>
- Suprapti, c, Dwi Takariani. (2013). PENYIARAN DIGITAL : TANTANGAN MASA DEPAN TELEVISI LOKAL. *Prosiding*.
- Suwitri, S. (2018). *Konsep dasar kebijakan publik*. (6 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pasal 72 UU Ciptaker berisi tentang perubahan beberapa ketentuan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU  
Penyiaran)

Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke  
Implementasi Kebijakan Negara* (Edisi 5, hlm. 64). Bumi Aksara.

Wasko, J. (2011). "The Political Economy of Communications". Dalam John  
D.H.Downing, Denis McQuail, Philip Schlesinger, & Ellen Wartella  
(Eds.), *The Sage Handbook of Media Studies. Thousand Oaks: Sage  
Publications, 15(2), 309–330.*

Yohanes, M. O. B., Leope Pinnega Handika. (2018). Komunikasi  
Pemerintahan Antar Perangkat Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara  
Timur (Ntt). *Jurnal Penelitian Komunikasi, 21(1), 57–72.*  
<https://doi.org/10.20422/jpk.v21i1.481>

## TRANSKRIP WAWANCARA

### JARINGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI PENYIARAN DI PROVINSI GORONTALO

#### Wawancara dengan KPI Pusat, Muhammad Reza

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan

Dapatkah bapak/ibu menjelaskan bagaimana partisipasi aktor yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran yang akan berlangsung?

*Jawab : menurut hemat saya, bahwa semua stakeholder sudah sangat berpartisipasi terkait kebijakan ini, kalau dari kami ya, dari KPI pusat, sudah mensosialisasikan kepada masyarakat dan berkoordinasi kepada semuanya, karena dalam waktu dekat kebijakan ini akan dilaksanakan.*

b. Preferensi kebijakan

Menurut anda bagaimana preferensi kebijakan KPI pusat terkait dengan implementasi Kebijakan Digitalisasi Penyiaran?

*Jawab: jadi kami memberikan pengawasan jalannya program migrasi tv digital dalam semua wilayah termasuk wilayah provinsi gorontalo.*

c. Koalisi

Menurut anda bagaimana koalisi yang terjalin diantara pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran?

*Jawab: iya, kalau berbicara terkait koalisi kami telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam hal penyediaan STB ini, karena tentu nantinya masyarakat yang masih menggunakan TV analog tidak akan mendapatkan siaran jadi masyarakat harus memasang STB.*



d. Different in Time (berbeda dalam waktu)

Menurut anda bagaimana different in timen atau berbeda dalam waktu dalam implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran?

Jawab: *jadi tahap pertama, Pembagian Wilayah pada tahapan pertama yaitu di Wilayah kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan program tersebut berdasarkan data yang telah diterima dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Tahap kedua, Pembagian pada tahap ke 2 yaitu di kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato Pada tahap ke 2 ini, pemerintah baru dimulai pada bulan januari tahun 2023, karena keterbatasan sumber daya manusia, karena ini bukan bantuan social seperti baisanya, karena perlu lagi SDM untuk memasang STB pada rumah-rumah masyarakat yang mendapatkan STB gratis tersebut*

**Wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo**

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan

Menurut anda bagaimana partisipasi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan digitalisasi penyiaran?

Jawab: iya, jadi semua kita libatkan tanpa terkecuali agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik dan kami gencar melakukan sosialisasi ke daerah daerah.

b. Preferensi Kebijakan

Menurut bapak/ibu bagaimana preferensi kebijakan yang akan di ambil oleh kominfo terkait digitalisasi penyiaran ini?

Jawab: jadi kami dari kominfo sangat setuju dengan kebijakan ini dan sangat mendukung, tentu kami akan fasilitasi, khususnya jaringan.

c. Koalisi

Menurut anda bagaimana koalisi kominfo pusat terhadap pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan yang akan berlaku?

Jawab: jadi kami telah menjalin kerjasama dari berbagai pihak termasuk pihak swasta.

d. Different in Time (berbeda dalam waktu)

Menurut anda apakah ada perbedaan waktu yang akan diambil oleh kominfo apabila telah dilaksanakan ?

*Jawab: jadi nantinya, ketika kebijakan ini akan di implementasikan maka kami dari kominfo tentu akan memberikan himbauan terkait dengan waktu pelaksanaan kebijakan ini akan diterapkan agar masyarakat tidak kaget dengan hilangnya gambar pada TV mereka masing-masing, tentu ini akan bertahap pada setiap daerah.*

### **Wawancara dengan Ketua KPID Gorontalo**

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan

Menurut anda bagaimana partisipasi aktor yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan di provinsi gorontalo?

Jawab: iya, di gorontalo sendiri partisipasi setiap aktor yang berkepentingan cukup baik ini terlihat dari banyaknya dari pihak swasta yang ingin melakukan kerjasama dalam hal penyediaan STB.

b. Preferensi Kebijakan

Menurut anda bagaimana preferensi kebijakan yang akan di ambil oleh KPID Gorontalo ?

Jawab: jadi kami melibatkan lintas sektor, mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

c. Koalisi

Menurut anda bagaimana koalisi yang terjalin kepada semua stakeholder dalam implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran di provinsi gorontalo?

*Jawab: dari pemerintah sendiri, dimulai dari perencanaan program ya, Perencanaan Pemberian Set Top Box gratis kepada 5.684 KK di Gorontalo, kemudian dalam pengimplementasian program ini diberikan dengan tiga tahap, yaitu pemberian di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, tahap ke 2 di kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato dan terakhir di Kabupaten Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo Utara dan Adanya bantuan juga berupa pemasangan langsung yang dilakukan tim dari pemerintah untuk pemasangan langsung STB kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.*

d. Different in Time (berbeda dalam waktu)

Menurut anda bagaimana cara untuk mengatur waktu apabila kebijakan ini berlaku di provinsi gorontalo?

*Jawab: ya, jadi tetap akan kami akan atur waktunya jadi semua akan bertahap, ada tiga tahapan nantinya yang akan kita lakukan dimulai dari pembagian wilayah, tahap kedua, penyaluran STB pada masyarakat, ketiga, sepertinya perlu lebih digencarkan untuk disosialisasikan mengenai program ini, karena untuk di kabupaten Gorontalo Utara masyarakatnya masih banyak yang menggunakan Tv Analog tidak paham yang namanya Tv Digital.*

## **Wawancara dengan Ketua Kominfo Provinsi, Kota/ Kabupaten**

### a. Partisipasi aktor yang berkepentingan

Menurut anda bagaimana partisipasi aktor yang terlibat terkait kebijakan digitalisasi penyiaran?

Jawab: semua sudah ikut berpartisipasi karena ini adalah kebijakan pemerintah dan akan berlaku secara nasional, jadi semua stakeholder mau tidak mau akan terlibat.

### b. Preferensi Kebijakan

Menurut anda bagaimana preferensi kebijakan yang akan diambil oleh daerah terkait kebijakan digitalisasi penyiaran?

*Jawab: kami dari kominfo provinsi dan kabupaten telah berkoordinasi dari jauh-jauh hari terkait kebijakan dari pemerintah pusat dalam pemberlakuan dari tv analog ke tv digital dan akan melaksanakan kebijakan itu dengan baik dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang nantinya.*

### c. Koalisi

Menurut anda bagaimana bentuk koalisi yang terjalin untuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah?

Jawab: jadi selama ini bentuk koalisi dan koordinasi kami sudah dilakukan setelah ada wacana dari pemerintah pusat bahwa akan ada pengalihan TV analog ke TV digital.

### d. Different in Time (berbeda dalam waktu)

Menurut anda apakah ada perbedaan waktu?

Jawab: tentu ada ya, karena hal seperti ini tentu tidak akan mudah dilakukan, kami akan terus berupaya untuk membagi waktu melakukan sosialisasi ke daerah dan masyarakat yang ada di desa.

## Wawancara dengan Masyarakat

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan

Menurut anda bagaimana sebagai masyarakat dalam implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran di gorontalo ini?

Jawab: kami sebagai masyarakat tentu hanya akan mengikuti kebijakan dari pemerintah, tentu dengan menyediakan dan memfasilitasi kami dengan STB yang akan digunakan nantinya ketika peralihan tv analog ke tv digital.

b. Preferensi Kebijakan

Bagaimana preferensi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah gorontalo ?

Jawab: *Saya melihat, pemerintah telah mengencarkan sosialisasi hingga kebawah pemerintah Desa, dan kami masyarakat, merasa bersyukur sekali dengan adanya kebijakan beralih ke TV digital, kami masyarakat tidak perlu susah lagi untuk mendapatkan Se Top box (STB) karena sudah dapat secara gratis dari pemerintah.*

c. Koalisi

Menuurut anda, bagaimana bentuk koalisi yang dibangun pemerintah?

Jawab: kami masyarakat melihat sebagian mendukung adanya program tersebut dan masih banyak masyarakat yang belum beralih ke Tv Digital, karena masih nyaman dan dengan Tv Analog.

d. Different in Time (berbeda dalam waktu)

Bagaimana perbedaan dalam waktu apabila kebijakan digitalisasi penyiaran berlaku?

Jawab: Kami masyarakat hanya menunggu datangnya pemberian STB gratis.

## Wawancara dengan Pemerhati Penyiaran

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan

Menurut bapak/ibu bagaimana bentuk partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran?

Jawab: kalau saya melihatnya begini, pemerintah dan masyarakat mau tidak mau akan bersinergi dengan kebijakan ini tentu pemerintah harus menyediakan fasilitas dan masyarakat sebagai pengguna utama dari kebijakan itu.

b. Preferensi Kebijakan

Menurut anda sebagai pemerhati penyiaran bagaimana preferensi kebijakan ?

Jawab: dari kebijakan ini tentu kami setuju saja karena sangat baik Cuma persoalannya adalah kondisi masyarakat yang semua tidak mampu untuk membeli STB ini, takutnya akan menimbulkan kegelisahan karna masyarakat harus membayar

c. Koalisi

Menurut anda bagaimana bentuk koalisi dalam implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran?

Jawab: iya, saya melihat belum ada bentuk koalisi yang terbangun mereka masih jalan sendiri sendiri.

d. Different in Time (berbeda dalam waktu)

Menurut anda bagaimana perbedaan dalam waktu apabila kebijakan digitalisasi di provinsi Gorontalo dilakukan?

Jawab: ketika kebijakan digitalisasi ini berlaku maka perlu adanya pembagian waktu mulai pada tahap sosialisasi, baru kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir adalah mengevaluasi.